

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Berlakunya undang-undang tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki pemerintah dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Zein, 2008)

Namun semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik menyebabkan timbulnya gejolak yang berujung pada ketidakpuasan. Dimana keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Tetapi, apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola atau pejabat pemerintah sering berbeda. Ini berdampak pada timbulnya kesenjangan harapan sehingga terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi tuntutan yang semakin tinggi yang ditujukan pada pertanggungjawaban yang diberikan

oleh pejabat pemerintah atas kepercayaan yang diamanatkan pada mereka. Berarti, kinerja pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kebutuhan adanya pengukuran kinerja terhadap instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan pengawasan (monitoring) dan pelaporan pencapaian suatu program yang dilakukan secara terus-menerus, khususnya penilaian kemajuan pencapaian program berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan semula (Nurkhamid, 2008).

Kinerja yang digapai suatu organisasi pada umumnya sebagai prestasi para anggota organisasi itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena kinerja pemerintah telah mengarah ke *good governance*. Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas, terukur dan dapat teraktualisasi dalam kinerja organisasi. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut (Agusti, 2012)

Pemakaian anggaran merupakan konsep yang sering dilakukan untuk melihat indikator kinerja suatu organisasi sektor publik. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat (wulandari, 2007).

Partisipasi penyusunan anggaran dibutuhkan agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (wulandari, 2007). Partisipasi merupakan konsep dimana seorang bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya (Robbins, 2002: 179). Dengan kata lain bawahan dan atasan memiliki suara dalam proses manajemen. Partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja karena dengan adanya komunikasi antara atasan dan bawahan dapat memungkinkan bawahan untuk memilih.

Kinerja dapat diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan visi dan misi sebagai komitmen dari suatu organisasi. Komitmen tersebut memberikan alasan untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat dalam organisasi. Setiap organisasi harus memiliki solidaritas yang tinggi dalam arti lebih mementingkan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi sehingga dapat saling bekerja sama untuk menjalankan tugasnya. Komitmen juga berarti bahwa pegawai mematuhi peraturan dan berupaya melaksanakan tugas dengan baik untuk mendukung tercapainya visi dan misi. Sumber daya manusia merupakan aset vital pada hampir semua jenis organisasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki kinerja organisasi tidak mungkin dapat berhasil jika komitmen pegawai yang tercermin dari perilakunya tidak diarahkan dengan baik. Informasi hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan *feedback* (umpan balik) untuk mengarahkan perilaku pegawai menuju perbaikan kinerja selanjutnya. (wahyuningsih, 2012)

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja telah dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh J. Sumarno (2005) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan negative yang kuat antara partisipasi anggaran dan kinerja pegawai dan pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja pegawai adalah positif dan signifikan,. Penelitian lain yang dilakukan oleh Juliami Pasaribu (2010) menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Kemudian Rafika Anggraeni (2009) mengungkapkan secara parsial partisipasi anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja maka menjadi salah satu alasan peneliti untuk meneliti kembali.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Rafika Anggraeni (2009) yang meneliti mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, diawali dengan tahun yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan objek yang berbeda yakni pada pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sedangkan penelitian sebelumnya SKPD Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Mengingat perlunya menilai suatu kinerja dengan mengambil satu dinas sehingga kita dapat mengetahui kualitas dari dinas tersebut.

Berbeda dengan pengambilan secara rata-rata sehingga sulit menilai suatu dinas mempunyai kinerja yang baik atau buruk.

Peneliti ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah sebagai objek penelitian karena telah diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja di pemerintahan ini. Dimana anggaran disusun berdasarkan program kerja, terdapat kejelasan maksud dan tujuan permintaan dana, dan fokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Anggaran yang disusun sangat erat kaitannya dengan publik. Namun, apakah didukung dengan penyusunan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Dapat diketahui adanya masalah dari DISPENDA yang tidak mampu memenuhi target pendapatan sehingga menyebabkan rasionalisasi anggaran (Antara 11/11/2013). Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mengelola keuangannya dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Namun dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan suatu komitmen yang kuat agar tidak terjadi kecurangan dan tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Hal ini penting untuk dievaluasi mengingat banyaknya peraturan tertulis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat sampai pada kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Jangan sampai hanya menjadi sebatas peraturan dan teori, karena dalam membuat peraturan itu sendiri, negara mungkin telah menghabiskan sekian banyak dana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menemukan bukti empiris yang tertuang dalam penelitian berjudul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah kebijakan otonomi daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran mampu meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah?
3. Apakah komitmen organisasi dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kinerja Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti

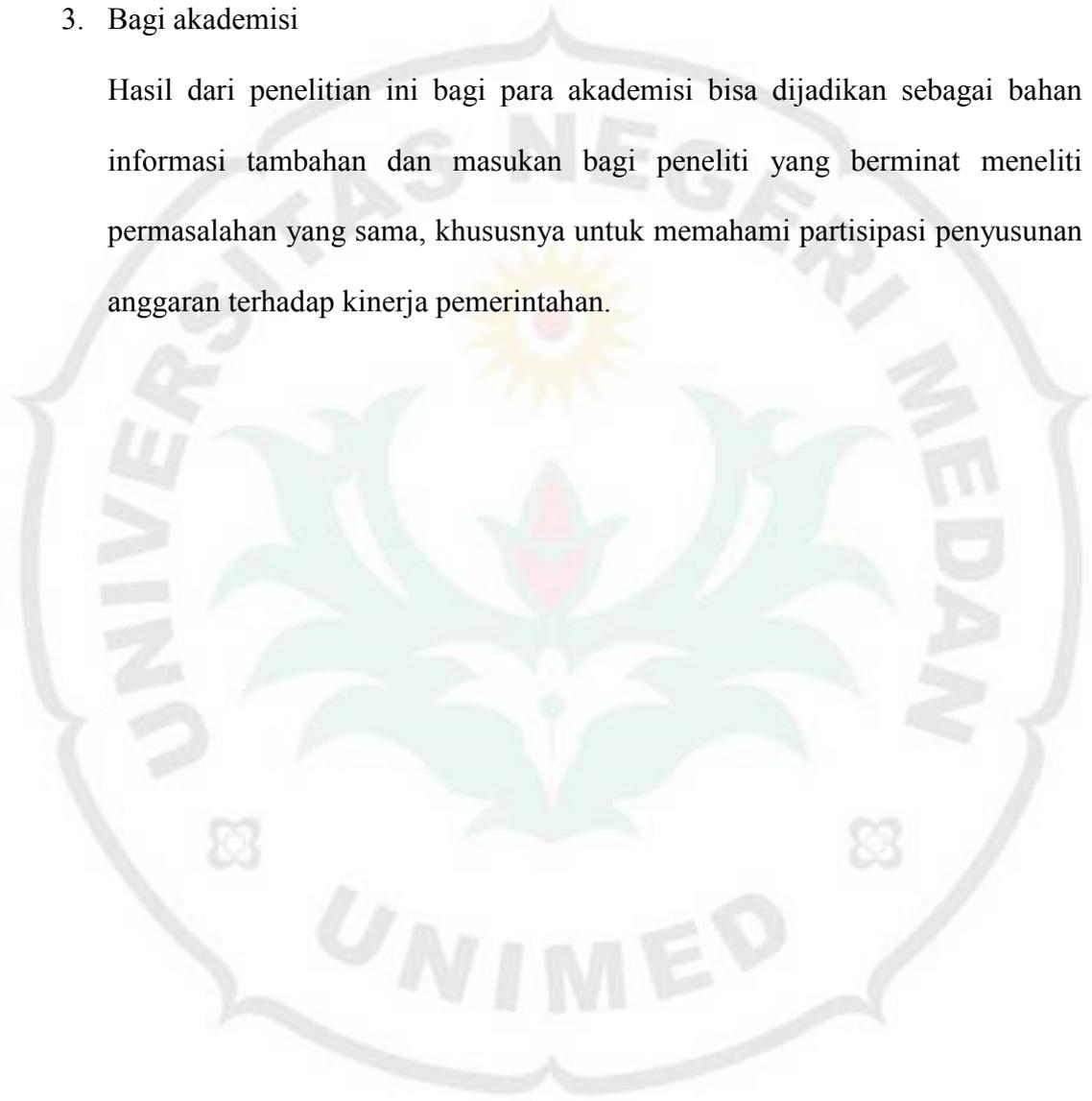
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. Bagi organisasi sektor publik atau pihak yang terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan kebijakannya sehingga kinerja organisasi publik tersebut menjadi lebih baik.

### 3. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini bagi para akademisi bisa dijadikan sebagai bahan informasi tambahan dan masukan bagi peneliti yang berminat meneliti permasalahan yang sama, khususnya untuk memahami partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintahan.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY